

# **FUNGSI HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG**

Oleh:  
**WAHYUDI RIZKY**  
NIM. E42011049

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2016

E-mail : [yudiw762@yahoo.com](mailto:yudiw762@yahoo.com)

## **Abstrak**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fungsi bagian humas dalam melaksanakan komunikasi pemerintahan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi masalah yang ada berkaitan dengan fungsi humas dalam melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi mengenai kegiatan Pemerintah Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang belum optimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi humas dalam melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi terkait menjalankan komunikasi pemerintahan di Sekretariat Daerah belum optimal. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang harus memperbaiki berbagai dimensi antara lain menentukan masalah, perencanaan program, berkomunikasi dan mengevaluasi program agar bagian humas dalam melaksanakan fungsinya dapat berjalan optimal. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini antara lain menambah Anggaran humas, meningkatkan fasilitas dan alat media dalam melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi, melakukan komunikasi dan berkoordinasi kepada bagian lain, meningkatkan kualitas kinerja staf bagian humas dalam melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi terkait menjalankan Komunikasi Pemerintahan.

Kata-kata Kunci: Fungsi, Humas, Dokumentasi, Komunikasi, Pemerintahan,

## **FUNCTIONS OF PUBLIC RELATIONS IN IMPLEMENTING GOVERNMENT COMMUNICATIONS IN THE ENVIRONMENT OF REGIONAL SECRETARIAT KETAPANG REGENCY**

### **Abstract**

This Scription is intended to describe and analyze the function of public relations in implementing government communications in the environment of Regional Secretariat Ketapang regency. The title of this Scription was appointed by the identification of the existing problems related to the function of public relations in implementing of coverage activities and make a documentation about the activities of Local Government in the Regional secretariat Ketapang regency that not run optimal yet. This research uses descriptive research with qualitative methods. The conclusion from this research indicate that the function of public relations in implementing of coverage and documentation related to running the government communications in the regional secretariat is is not run optimal yet. Public Relations in Regional Secretariat section Ketapang regency should improve various dimensions, such as determine the issues, program planning, communicating and evaluating programs so that the public relations department in carrying out its functions can run optimally. The recommendations that given in this study are, increase the public relations budget, improve facilities and media tools in implemeting coverage and documentation, communicate and coordinate with the another section, improve the quality of staff performance in carrying out the public relations activities in coverage and documentation related to running the government communications.

*Keywords: Function, Public Relations, Communications, Government.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Penelitian**

Kegiatan administrasi kehumasan di lingkungan internal merupakan salah satu faktor penting dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Bagian humas dalam melaksanakan fungsinya perlu memberikan petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan prosedur kerja agar terjalin kerjasama dan tugas dapat diselesaikan dengan baik. Humas perlu membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan program kerja. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai dan ketentuan yang berlaku untuk penyempurnaan dan karier pegawai, melaksanakan pelayanan humas dan dokumentasi kegiatan pimpinan pemerintah daerah, sandi dan telekomunikasi serta “melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi”.

Dalam latar belakang masalah peneliti ingin menyampaikan beberapa indikasi-indikasi masalah terkait dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Berdasarkan beberapa indikasi masalah dan fenomena yang terlihat pada pengamatan awal menunjukkan, adanya hambatan dalam melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi sehingga bagian humas dalam menjalankan komunikasi

pemerintahan kurang optimal. Indikasi-indikasi masalah yang sering terjadi seperti adanya kunjungan kerja bupati yang tidak terliput sehingga mengakibatkan adanya informasi yang tidak dapat disampaikan kepada masyarakat, sehingga membuat citra pemerintah dimata masyarakat menjadi kurang baik.

Bagian humas dalam melaksanakan fungsinya harus mendapat informasi yang rinci terkait dengan kegiatan pemerintahan, oleh karena itu tidak adanya kegiatan peliputan dan dokumentasi yang dilakukan oleh bagian humas, menyebabkan humas dalam mengelola informasi untuk disampaikan keluar lingkungan pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik.

### **2. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di bagian humas, khususnya dalam melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi terkait menjalankan komunikasi pemerintahan Di Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang

### **3. Rumusan Permasalahan**

Adapun rumusan permasalahan yang diambil peneliti ialah : mengapa bagian humas dalam melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi kurang optimal terkait melaksanakan komunikasi pemerintahan di lingkungan sekretariat Daerah ?

#### 4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang khususnya di bagian humas dalam melakukan peliputan dan dokumentasi terkait melaksanakan komunikasi pemerintahan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.

#### 5. Manfaat Penelitian

##### a) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada Sekretariat daerah khususnya bagian humas dalam melaksanakan komunikasi pemerintahan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.

##### b) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian pada ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan.

##### c) Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi penelitian dan juga sebagai informasi yang dapat di sampaikan kepada masyarakat.

#### B. KAJIAN PUSTAKA

##### 1. Fungsi Humas

Menurut Cultip-Center (dalam Morisan, 2010:108) dalam melaksanakan fungsi kehumasan ada empat langkah yaitu:

- a) Menentukan masalah
- b) Perencanaan dan penyusun program
- c) Melakukan tindakan dan berkomunikasi
- d) Evaluasi program

##### 2. Fungsi Humas Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan fungsi kehumasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah, pada Bab III, Pasal (10) yaitu meliputi : (1) Manajemen hubungan masyarakat. (2) Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga. (3) Manajemen komunikasi krisis. (4) Pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati No 21 Tahun 2008 pada pasal 13 Bahwa bagian humas pemerintahan daerah dalam menjalankan komunikasi vertikal dan horizontal dibawah asisten pemerintahan dilingkungan Sekretariat Daerah, yaitu :

- a. Memimpin penyelenggaraan Bagian Humas berdasarkan pedoman dan petunjuk kerja yang berlaku;

- b. Menyusun program kerja Bagian Humas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar dapat terlaksana dengan baik;
- c. Merumuskan program kerja Bagian Humas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- d. Menghimpun dan memelihara peraturan dan perundang-undangan serta juklak dan juknis yang berkaitan dengan bidang tugas;

### 3. Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi Pemerintahan adalah merupakan, penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara Erliana Hasan (2005:65). Aparatur pemerintah sebagai komunikator pemerintah yang terdiri dari tingkat bawah yakni Ketua Lingkungan sampai dengan tingkat tinggi yakni Presiden harus mampu mengkomunikasikan setiap apa yang ingin dikomunikasikan tentang komunikasi pemerintahan.

Selain itu faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam komunikasi Pemerintahan juga diungkapkan oleh Hasan (2005:123), ia menyatakan bahwa: Faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam karakteristik komunikasi pemerintahan, dapat diidentifikasi sebanyak 5 faktor yang dianggap paling

potensial untuk kelancaran dan efektifitas komunikasi, yakni mencakup:

- a. komunikasi atasan dengan bawahan;
- b. komunikasi ke bawah;
- c. persepsi atasan mengenai komunikasi dengan bawahan;
- d. komunikasi ke atas;
- e. keandalan informasi.

Menurut Erliana Hasan (2014:15) komunikasi mencakup berbagai aspek dan unsur-unsur interaksi individu, maka abstraksi historis komunikasi memberikan suatu prespektif bahwa pengekangan proses komunikasi tercemar dari sikap perilaku penguasa.

Pemerintahan juga merupakan pranata yang mengatur aktivitas masyarakat yang didalamnya terdiri dari lembaga lembaga pemerintah negara/daerah, dan untuk melaksanakan aktivitas tersebut pada intinya dilakukan oleh pejabat dan pegawai pemerintah. Aparatur pemerintah sebagai komunikator akan mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat apabila memiliki karakteristik sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya sebagai pengayom masyarakat sekaligus sebagai motivator, mediator dan fasilitator pelaksanaan otonomi daerah (Erliana Hasan, 2014:15).

### 4. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu bertujuan untuk memperoleh gambaran

secara sistematis mengenai “Fungsi Hubungan Masyarakat Dalam Melaksanakan Komunikasi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang”. Faktual dan akurat mengenai faktor-faktor serta hubungan dengan fakta. Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan dari objek penelitian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung guna memperoleh permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, metode deskriptif merupakan suatu pendekatan terhadap objek penelitian guna melihat permasalahan focus mengidentifikasi masalah pada saat sekarang berdasarkan apa adanya.

### **5. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat daerah Kabupaten Ketapang. Adapun alasan peneliti memilih di Sekretariat tepatnya dibagian Humas karena menurut pengetahuan selama saya melakukan praktek pengalaman kerja, di Kabupaten Ketapang khususnya dibagian humas dalam menjalankan komunikasi pemerintahan terdapat banyak kekurangan fasilitas dan keterampilan pegawai menjalankan tugas dan fungsi sebagai humas (public relations), sehingga dalam menjalankan komunikasi internal menggunakan alat media seperti radio, pamlet, media pers kurang berjalan dengan

baik hal ini dikarenakan minimnya fasilitas atau anggaran untuk memenuhi kegiatan kehumasan dalam menjalankan tugas sebagai melaksanakan komunikasi pemerintahan dilingkungan sekretariat daerah. Sehingga kegiatan humas dalam melaksanakan fungsinya belum maksimal dan masih terdapat banyak hambatan.

### **6. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah siapa yang digunakan penulis sebagai informan dalam melakukan penumpulan data baik melalui wawancara, dokumen ataupun observasi. Penentuan informan kunci ini mewakili subjek dan objek penelitian sehingga dapat memberikan keterangan yang berimbang. Adapun informan atau subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Subjek penelitian ini dilakukan dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang diantaranya :

- a) Kepala sub bagian humas
- b) Staf bagian Humas
- c) Kepala sub bagian Media Massa

### **7. Teknik Keabsahan Data**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan menguji kredibilitas serta mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber data penelitian. Penulis menggambarkan berbagai sumber data penelitian dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi

serta mewawancarai lebih dari satu subjek yang memiliki sudut pandang yang berbeda.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Penelitian ini membahas tentang bagian humas di Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang dalam menjalankan fungsinya yaitu melakukan kegiatan peliputan dan dokumentasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan komunikasi pemerintahan, dibawah Asisten I Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Hal ini perlu dilaksanakan oleh humas untuk menjalankan program kegiatan dalam menyusun hasil laporan yang nanti akan dipertanggung jawabkan bagian humas kepada pusat tentang hasil laporan dari setiap kegiatan humas dalam satu tahun.

Humas sebagai manajemen suatu organisasi sekaligus sebagai pelayan masyarakat terkait sebagai salah satu perangkat dalam memberikan sumber informasi berkaitan dengan pemerintah daerah kepada masyarakat melalui media yaitu, media cetak, berosur, media penyiaran dan lain lain sebagainya, oleh karena itu humas perlu melaksanakan kegiatan peliputan untuk diolah dan disaring lalu disampaikan kepada

masyarakat sebagai bentuk komunikasi pemerintahan antara pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan yang diungkapkan oleh, Erliana Hasan (2005:65) bahwa komunikasi pemerintahan adalah merupakan penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara.

Aparatur pemerintah sebagai komunikator yang terdiri dari tingkat bawah yakni ketua lingkungan sampai dengan tingkat tinggi yakni Presiden harus mampu mengkomunikasikan setiap apa yang ingin disampaikan tentang hubungan pemerintahan.

Dalam hal ini humas harus melaksanakan kegiatan kehumasan demi menunjang pelaksanaan komunikasi pemerintahan melalui kegiatan-kegiatan peliputan dan dokumentasi pemerintahan daerah, yang dilakukan oleh humas akan disampaikan kepada publik eksternal yaitu dari humas pemerintah kepada masyarakat. Sebagai pelayanan publik yang biasa disebut sebagai *public relations* yaitu humas sebagai penghubung antara komunikasi pemerintah kepada masyarakat, humas saat ini sangat membutuhkan dukungan serta fasilitas mengenai alat alat yang mendukung kegiatan peliputan dan dokumentasi dalam melaksanakan fungsinya. Humas dalam melaksanakan fungsinya harus menentukan masalah

mengenai hal hal terkait kegiatan peliputan yang ada di Sekretariat Daerah.

Bagian humas dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati No 21 Tahun 2008 Pasal 16 yaitu menyusun rencana kerja peliputan dan dokumentasi, serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang peliputan dan dokumentasi di bawah kepala sub bagian peliputan dan dokumentasi. Untuk mendiskripsikan langkah langkah kegiatan humas dalam melaksanakan kegiatan humas di Sekretariat Daerah, peneliti menggunakan teori Cultip-Center-Broom (dalam, Morisan 2010;108) yang membahas empat langkah sebagai berikut:

(1) Menentukan masalah

Sesuai dengan Peraturan Bupati No 21 tahun 2008 tentang pelaksanaan humas melakukan kegiatan peliputan dan dokumentasi untuk meliput setiap kegiatan pemerintah khususnya terkait kegiatan bupati dalam melaksanakan kunjungan kerja. Hasil dari peliputan yang telah dilaksanakan oleh humas dapat langsung diberikan kepada masyarakat dalam bentuk komunikasi pemerintahan yaitu komunikasi yang dilakukan dari pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu melalui perantara humas komunikasi pemerintahan dapat dilaksanakan setelah melalui proses dari kegiatan peliputan dan dokumentasi yang nantinya hasil dari pada kegiatan

peliputan dapat di olah dan disaring oleh humas kemudian dapat di tersampaikan kepada masyarakat dalam bentuk suatu informasi berupa Koran,bulletin, dan media lainnya. Oleh karena itu dalam melakukan suatu kegiatan humas perlu menyiapkan suatu rencana atau program agar pelaksanaan kegiatan peliputan dalam menjalankan fungsinya terkait melakukan komunikasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

(2) Perencanaan dan penyusunan program

Humas sudah melakukan perencanaan dan mencoba menyusun suatu program dalam melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi dengan maksimal sesuai dengan fasilitas yang ada di bagian humas. Pada saat ini humas sudah berupaya mengajukan penambahan anggaran dan beberapa kebutuhan lainnya seperti beberapa kamera dalam melaksanakan kegiatan kehumasan. Hal ini semata - mata dibutuhkan oleh humas dalam menambah keperluan dan kebutuhan terkait melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi.

(3) Melakukan tindakan dan berkomunikasi

Humas Pada Pemerintah Daerah harus professional dalam berkomunikasi hal ini mengingat bahwa humas adalah manajemen dalam pelayanan informasi serta sebagai perantara atau jembatan antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam menjelaskan seluruh kegiatan pemerintahan

daerah khusus terkait pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja bupati yang berkaitan langsung dengan kepentingan pemerintahan dan masyarakat. Tindakan humas dalam melakukan suatu komunikasi merupakan bentuk dari pada humas dalam menjalin suatu koordinasi yang dapat melibatkan setiap aspek pengelolaan media oleh pemerintah untuk menyampaikan tujuan tujuan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk komunikasi pemerintahan, oleh karena itu kerjasama bagian humas dengan pihak lain sangat di butuhkan untuk mempermudah menyampaikan informasi.

#### (4) Evaluasi program.

bagian Humas peliputan dan dokumentasi mengatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi humas terkait dalam menjalankan peliputan dan dokumentasi, humas tetap melaksanakan fungsinya secara profesional untuk tetap menjadi corong pemerintahan dalam memberikan informasi melalui kegiatan peliputan kepada masyarakat. Bagian humas harus tetap melaksanakan evaluasi program yang sesuai dengan Peraturan Pemandagri No 13 Tahun 2011 yaitu evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang ditemukan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) membuat prioritas evaluasi penyelenggaraan kegiatan kehumasan, (b)

melakukan evaluasi pada sumber data dan kebijakan kegiatan penyelenggaraan kehumasan, (c) menganalisa dokumen kegiatan dengan hasil kegiatan dan membuat rekomendasi atas hasil analisa kegiatan penyelenggaraan kehumasan.

## D. PENUTUP

### a) Kesimpulan

Hasil Penelitian mengenai fungsi Bagian Humas dalam melaksanakan komunikasi pemerintahan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang peneliti membahas tentang fungsi humas dalam melaksanakan fungsinya yaitu mengenai kegiatan peliputan dan dokumentasi kepada tiap bagian yang dibawah oleh Asisten I pemerintahan. Hal ini dilakukan oleh bagian humas untuk meliput kegiatan, yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintah Daerah.

### 1. Menentukan Masalah

Bahwa dalam menentukan masalah bagian humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sudah melaksanakan kegiatan, tetapi kegiatan tersebut tidak berjalan mulus dikarenakan bagian humas hanya memperoleh anggaran yang sangat minim untuk melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi serta kegiatan penting lainnya yang dilakukan oleh bagian humas. Akibat minimnya anggaran yang

diberikan kepada bagian humas menyebabkan humas dalam melaksanakan fungsinya kurang maksimal. Dalam hal ini bagian humas telah menentukan masalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh bagian humas sehingga humas dalam memanfaatkan anggarannya sebisa mungkin untuk tetap menghemat agar dapat memfasilitasi kegiatan humas dalam satu tahun.

## **2. Perencanaan dan Penyusunan Program**

Bahwa dalam perencanaan dan penyusunan program bagian humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang telah melakukan perencanaan dalam pengajuan alat-alat media, diantaranya ialah, kendaraan oprasional, computer, camera, *handycam* serta mencoba membuat *website*, untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan fungsi kehumasan terkait melakukan kegiatan peliputan dan dokumentasi. Bagian humas juga membuat tim dalam rangka untuk lebih meningkatkan kegiatan kehumasan dalam pelaksanaan kegiatan peliputan dan dokumentasi.

## **3. Melakukan Tindakan dan Berkomunikasi**

Bahwa bagian humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam menjalankan fungsinya telah melakukan tindakan dan berkomunikasi sebagai bentuk koordinasi yang dilakukan oleh bagian humas kepada bagian lain untuk

mempelancar pelaksanaan kegiatan peliputan dan dokumentasi. Tindakan dan berkomunikasi yang dilakukan oleh bagian humas harus sesuai dengan prosedur peraturan Bupati No 21 Tahun 2008. Tindakan dan komunikasi melalui koordinasi yang dilakukan bagian humas kepada bagian lain dilakukan agar komunikasi dalam melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi dapat berjalan dengan baik.

## **4. Evaluasi Program**

Bahwa bagian humas selalu melaksanakan evaluasi program pada akhir tahun kinerja, hal ini dilakukan oleh bagian humas agar lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan penyusunan perencanaan program yang selama ini belum terlaksana atau yang sudah terlaksana. Evaluasi yang dilakukan seperti ; evaluasi kinerja humas terkait peliputan, evaluasi terkait koordinasi yang dilakukan humas kepada bagian lain, evaluasi terkait anggaran humas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hasil akhir laporan kinerja, fasilitas dan anggaran bagian humas dalam melaksanakan fungsinya selama satu tahun kinerja, apakah kegiatan yang dilakukan oleh bagian humas Pemerintah Kabupaten Ketapang sudah berjalan dengan baik atau belum. Evaluasi yang dilakukan menjadi tolak ukur permasalahan yang selama ini menjadi hambatan humas dalam melaksanakan kegiatan peliputan dan

dokumentasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan komunikasi pemerintahan.

## b) Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, ada beberapa masukan atau saran kepada pihak bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan fungsinya yaitu menjalankan kegiatan peliputan dan dokumentasi dalam melaksanakan komunikasi Pemerintahan sesuai yang telah ditentukan, yakni :

- 1) Bagian humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan fungsinya perlu mengajukan menambah anggaran sebesar 3 Milyar kepada Bupati terkait APBD Kabupaten Ketapang, agar bagian humas dalam menjalankan fungsinya lebih optimal terkait melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi.
- 2) Perencanaan dan penyusunan program seperti, pembuatan website, penambahan tim kegiatan peliputan, penambahan fasilitas camera, handycame, computer, dan kendaraan operasional harus terlaksana agar humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam menjalankan fungsinya lebih efektif.

3) Tindakan dan komunikasi harus lebih sering dilakukan oleh bagian humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan pemerintah daerah yang dilakukan oleh bagian lain.

4) Bagian humas harus melakukan evaluasi dalam memperbaiki setiap kegiatan peliputan dan dokumentasi, agar bagian humas mengetahui kendala dan masalah yang sering terjadi dalam melaksanakan kegiatan kehumasan.

## E. REFERENSI

Andre, Harjana. 2000. *Audit Komunikasi: Teori Praktek*. Jakarta: PT.Grassindo.

Anggoro, M Linggar. 2000. *Teori dan Profesi Kehumasan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Arifin, Anggoro. 2002. *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Arni Muhammad. 2008. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Depari, Eduard. 1988. *Peranan Komunikasi Massa dalam pembangunan (satu kumpulan Karangan)*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.

Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Hubungan Masyarakat: Study Komunikasi Logis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

\_\_\_\_\_. 2003. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Fajar, Marhaeni. 2009. *Ilmu Komunikasi teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.  
H.A.W. Widjaja 2014. *Komunikasi dan hubungan Masyarakat*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Hasan, Erliaa,. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung : PT Refika Aditama

Morissan. 2010. *Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional*. Jakarta : Kencana.

Mulyana, Deddy. 2009. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Bupati Ketapang No. 21 Tahun 2008 tentang *Fungsi, Rincian Tugas, Dan Tata Kerja Seketariat Daerah Kabupaten Ketapang*. Ketapang : Bsgian Orngnisasi.

R. Wayne Pace Don F. Faules. 2010. *Komunikasi Oganisasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Ridwan, Muhammad. 2011. *Peraturan Perundang Undangan Tentang Kehumasan Dan Pelayanan Informasi No 13 Tahun 2011*. Pontianak.

Ruslan, Rosady. 2008. *Etika Kehumasan : Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Stewart L. Tuubbs – Sylvia Moss. 2001. *Human Communication*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafiiie. I.K. 2013. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi Kedua)*. Bandung: Mandar Maju

Tim Penyusun, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjung Pura*. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Pemeintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Tim Penyusun, Bagian Oraganisasi, 2008. *Peraturan Bupati No 21 Tahun 2008. Tentang Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja Seketariat Daerah Kabupaten*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
**PENGELOLA JURNAL MAHASISWA**

Jalan A Yani Pontianak, KotakPos 78124  
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Wahyudi Rizky  
NIM / Periode Lulus : E42011049 / 2016  
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address / HP : [yudiw762@yahoo.com](mailto:yudiw762@yahoo.com) / 081349373871

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**FUNGSI HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG**

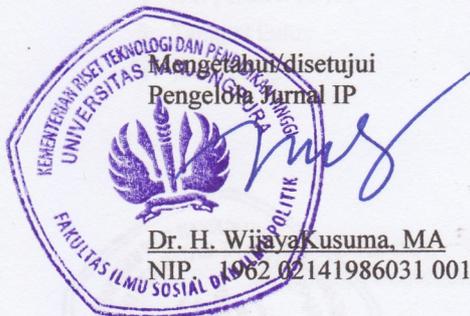
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : 15 Maret 2016

  
(Wahyudi Rizky)